

DINILAI SEBABKAN BERBAGAI PENYAKIT

Warga Rusun Marunda Boikot Aktivitas Bongkar Muat Batu Bara

JAKARTA (IM) - Mera-sa dirugikan oleh aktivitas pembongkaran batu bara, sejumlah warga Rusun Marunda, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara melakukan aksi boikot terhadap PT Karya Cipta Nusantara (KCN).

Ketua RW 10 Rusun Marunda, Nasrulloh Dompas, mengancam perbuatan PT KCN karena dampak polusi yang ditimbulkan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan warga sekitar.

"Sikap kami, jelas menolak apapun bentuk kompensasi, kami ga peduli. Karena kesehatan mahal pak, kesehatan itu tak bisa dinilai oleh apapun gitu," ujarnya, Rabu (16/3).

Nasrulloh menambahkan kalau saat ini penduduk Rusun Marunda sudah lama merasakan dampak akibat polusi batu bara yang dilakukan PT KCN.

Efek tersebut membuat sejumlah warga mengidap penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan yang paling

parah iritasi mata. "Kelu-hannya ya gatel gatel ada juga sesak napas kalau menurut data puskesmas banyak sesak napas," tuturnya.

"Ini berasal dari limbah batubara dari pengelola PT KCN yang dikatakan tidak layak dari lingkungan hidup," sambungnya.

Nasrulloh berharap aktivitas bongkar muat batu bara bisa segera dipindahkan, karena khawatir kesehatan penduduk terdampak bisa semakin buruk, khususnya anak-anak.

"Harapan dari kami supaya debutnya jangan kesini karena anak-anak kami ribuan loh pak dari 29 tower ya hampir 13 ribuan, takutnya kalau suatu saat mereka ikut tes, ada flek di paru-parunya kan kesian," pungkasnya.

Seperti diketahui warga Rusun Marunda sudah melakukan aksi penyampaian pendapat di kantor Kementerian Perhubungan agar segera memberikan sanksi tegas terhadap perbuatan PT KCN. ● yan

Sekda Kabupaten Bekasi Tutup Forum Perangkat Daerah Tahun 2022

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi (tengah atas) saat menutup kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi di Hotel Nuanza, Cikarang Selatan, Selasa (15/3).

CIKARANG SELATAN (IM) - Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, menutup kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2023, yang bertempat di Hotel Nuanza, Cikarang Selatan, Selasa (15/3).

Sekda Dedy Supriyadi menjelaskan, setelah disepakatinya sinkronisasi usulan dengan program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya Pemkab Bekasi akan bersiap untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Bekasi.

"Hari ini kita saksikan bersama acara penutupan Forum Perangkat Daerah Tahun 2022. Tadi sudah disampaikan hasilnya, maka tahapan selanjutnya kita akan menyiapkan Musrenbang Tingkat Kabupaten," jelasnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (16/3).

Pada Musrenbang Tingkat Kabupaten nanti, ia mengatakan terdapat kemungkinan perubahan pada program dan kegiatan yang telah disepakati, dikarenakan adanya agenda pembahasan kembali dalam forum gabungan, serta belum dicantumkan rencananya kerja dari masing-masing Perangkat Daerah.

"Pada Musrenbang Tingkat Kabupaten nanti, kemungkinan bisa ada perubahan, karena ada pembahasan dalam

forum gabungan lagi. Usulan-usulan tersebut bisa berkembang karena masing-masing Perangkat Daerah juga belum mencantumkan rencana kerjanya," katanya.

Tidak hanya itu, ia berpesan kepada seluruh Perangkat Daerah agar dapat berinovasi dalam merealisasikan usulan yang terkandung dalam APBD Kabupaten Bekasi. Perangkat Daerah diharapkan dapat memaksimalkan sumber-sumber pendanaan lain, seperti dari bantuan atau kerja sama CSR.

"Diharapkan tidak hanya bertumpu pada APBD saja, tapi bisa dimaksimalkan dari sumber-sumber dana lain, seperti misalnya dari CSR," ujarnya.

Terakhir, ia meminta agar seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal dan merealisasikan usulan serta keinginan masyarakat, sehingga pembangunan Kabupaten Bekasi berjalan dengan merata dan manfaatnya bisa dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat.

"Mari bersama-sama kita kawal dan realisasikan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bermakna untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi," harapnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatangan berita acara kegiatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2022 oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Bekasi. ● mdl

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PARADE PEMBALAP MOTOGP DI JAKARTA

Suasana parade MotoGP di kawasan Jalan M.H.Thamrin, Jakarta, Rabu (16/3). Parade digelar untuk memeriahkan seri kedua MotoGP yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022.

DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Usulan Tarif Integrasi MRT-LRT-TransJ

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo memastikan pihaknya bersama ketiga operator penyedia layanan masing-masing moda transportasi akan menghitung kembali besaran subsidi ideal sesuai masukan dari Komisi C DPRD DKI.

JAKARTA (IM) - DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengkaji ulang konsep penyatuan tarif integrasi transportasi JakLingko. DPRD DKI memandang

integrasi tarif tiga moda, yaitu TransJakarta, MRT, serta LRT, berhubungan langsung dengan beban subsidi yang diberikan melalui APBD. "Jadi yang kita subsidi ke-

pada masyarakat itu berapa. Jangan juga dengan adanya konsep integrasi tersebut malah membembi Pemprov DKI," kata Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Yusuf melalui keterangan tertulis, Rabu (16/3).

Yusuf menyampaikan, merujuk pada rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) melalui surat resmi Nomor 089/DTKJ/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta, tarif maksimal dari integrasi yang dimaksud adalah Rp 10 ribu. Besaran angka itu mempertimbangkan hasil kajian Willing-

ness to Pay (WTP) masyarakat berpenghasilan rendah untuk menggunakan kendaraan umum di Jabodetabek (MRT, LRT, TransJakarta, Mikrotrans, Minitrans, dan KCI) sekitar Rp 4.917.

Sementara itu, jika berdasarkan karakteristik perjalanan dekat sedang dan jauh, nilai WTP masyarakat untuk semua moda adalah Rp 3.050, Rp 4.753, dan Rp 5.481. Oleh sebab itu, Yusuf meminta masing-masing BUMD terkait dapat melaporkan kajian mengenai pemberian subsidi. Tujuannya agar DPRD DKI Jakarta dapat memberikan rekomendasi paparan kepada subsidi yang ideal. "Kita juga mau dari teman-teman di LRT, MRT, dan TransJakarta juga memberikan paparan kepada kita berapa subsidi yang akan diberikan. Apakah dengan rencana integrasi dari tiga moda transportasi subsidi yang berkurang atau bagaimana, ini kan perlu kita ketahui hal-hal tersebut," ungkap Yusuf.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo memastikan pihaknya bersama ketiga operator penyedia layanan masing-masing moda transportasi akan menghitung kembali besaran subsidi ideal sesuai masukan dari Komisi C DPRD DKI.

"Jadi untuk beban subsidi akan kita evaluasi lagi, karena memang besarnya variatif dari data yang ada di 2019 ada Rp

19 miliar dari besaran PSO kita Rp 4 triliun itu pengaruhnya dengan besaran subsidi.

Begitu juga demikian halnya dengan 2020 itu sekitar Rp 4 miliar dan 2021 adalah sekitar Rp 6 miliar dari besaran subsidi kita Rp 4,5 triliun," ujar Syafrin. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan tarif integrasi transportasi atau JakLingko maksimum sebesar Rp 10 ribu. Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut tarif bakal diberlakukan untuk tiga moda transportasi umum, yaitu MRT, LRT, dan TransJakarta.

"Pada saat tarif integrasi ini diterapkan, maka bagi penumpang yang menggunakan lebih dari satu moda, apakah dia hanya MRT dan TransJakarta, kombinasi TransJakarta, LRT, atau ketiga-tiganya, maka maksimum dia bayar hanya Rp 10 ribu," kata Syafrin Liputo di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/3) lalu.

Lebih lanjut, Syafrin menjelaskan ketika penumpang melakukan tap in pertama di salah satu dari tiga mode transportasi itu, akan dikenai tarif sebesar Rp 2.500. Biaya ini disebut sebagai boarding charge.

Setelah itu, tarif bakal disesuaikan sesuai dengan jarak yang ditempuh penumpang. Adapun tarif yang diusulkan sebesar Rp 250 per kilometer (km) dengan batas maksimum Rp 10 ribu serta maksimum penggunaan selama 3 jam. ● yan

30 Persen RTH di Jakarta akan Ditanami Tanaman Buah dan Sayur

JAKARTA (IM) - Sebanyak 30 persen dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta akan ditanami tanaman buah dan sayur. Program penanaman buah dan sayur tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (DK- PKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati dalam acara talkshow di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (16/3).

"30 persen ruang terbuka hijau akan kita tanami tanaman-tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura di

antaranya sayur-sayuran dan buah-buahan," kata wanita yang akrab disapa Eli tersebut.

Eli mengatakan, penanaman tanaman buah dan sayur tersebut merupakan program grand desain pertanian perkotaan Jakarta. Program itu direncanakan di tahun 2018 dan berjalan secara bertahap. Diharapkan di tahun 2030 nanti tanaman hortikultura tersebut sudah teranam di 30 persen RTH yang ada di Jakarta.

"Kami Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2018 itu sudah mempunyai yang namanya

grand desain pertanian yang akan diselesaikan nanti 2030," kata Eli. Program tersebut diharapkan bisa menurunkan lima persen dari kebutuhan sayur dan buah-buahan yang selama ini dipasok dari luar Jakarta.

Selain itu, Eli mengatakan, semakin banyak tanaman berarti produksi oksigen di Jakarta akan semakin baik.

"Jangan kaget kalau kemudian ada kupu-kupu di rumah kita, ada suara-suara burung di sekitar kita, artinya udara lingkungan kita semakin membaik," ucap dia. ● yan

Sekda Kabupaten Bekasi Minta Perbaikan Rutilahu Segera Dilakukan

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi (atas) saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Disperkimtan (bawah) di Hotel Grand Zuri, Cikarang Selatan, Selasa (15/3).

CIKARANG SELATAN (IM) - Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dedy Supriyadi memberikan pengarahannya kepada para pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi agar secepatnya melakukan perbaikan maupun rehabilitasi, sebanyak 2.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di wilayah Kabupaten Bekasi.

Hal ini disampaikannya, pada saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Disperkimtan, tentang Peningkatan Kapasitas Pegawai dalam Penyusunan SKP Berdasarkan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 dan Sistem Kebijakan Penilaian Angka Kredit Bagi Fungsional di Hotel Grand Zuri, Cikarang Selatan, pada Selasa (15/3).

Sekda menyampaikan, perbaikan Rutilahu tersebut harus segera dilakukan mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadhan. Meskipun perbaikan Rutilahu dilakukan secara bertahap, hal tersebut akan sangat membantu penerima manfaat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi keluarganya.

"Dalam waktu dekat sudah masuk bulan suci Ramadhan, akan sangat bagus jika sebanyak 2.500 unit Rutilahu ini bisa diperbaiki secara bertahap, setidaknya bagi si penerima akan san-

gat terbantu dapat rumah layak untuk keluarganya," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (16/3).

Lebih lanjut, ia menjelaskan percepatan perbaikan Rutilahu tersebut juga sebagai momentum pembuktian kepada masyarakat dan masyarakat maupun kepada Plt. Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki sebagai bentuk Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Disperkimtan.

"Termasuk Rutilahu, karena Pak Plt. Bupati ingin adanya percepatan. Ini juga bisa jadi pembuktian kepada masyarakat atau kinerja pemerintah. Jadi tolong segera dilakukan perbaikan dan dilakukan peresmian," jelasnya.

Selain itu, Sekda juga akan memantau dan memastikan peningkatan kinerja Disperkimtan mengenai daerah permukiman yang membutuhkan penerangan jalan, pembebasan lahan, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIR-UP), serta pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Dirinya berharap, seluruh rancangan program-program yang akan dijalankan Disperkimtan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.

"Saya ingin memastikan progres yang akan dicapai. Programnya sangat banyak dari masing-masing bagian, maka saya harap bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya agar bisa juga dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Terakhir dirinya berharap, melalui kegiatan Bimtek ini para pegawai dapat semakin meningkatkan peran dari setiap tupoksinya pada masing-masing bidang.

"Melalui ini selain bisa mendukung tupoksi kita, juga bisa berakselerasi dengan cepat untuk berperan kita sebagai apa, dibidang apa. Kita bisa menyelesaikan tugas kita," pungkasnya.

Selain itu, menurut Plt. Kepala Dinas Perkimtan, Nur Chaidir, sesuai dengan Refor-

masi Birokrasi, kegiatan Bimtek kali ini difokuskan pada penilaian Sistem Kinerja Pegawai ASN, dan penilaian Jabatan Fungsional. Tak hanya itu, para pegawai juga diharapkan dapat melakukan SKP nya secara mandiri. Dirinya juga menuturkan, selain Rutilahu, Disperkimtan juga akan meningkatkan kinerja dalam program Bersih Sehat dan Sejahtera (Bersika), dan pengolahan limbah domestik setempat.

"Bimtek kali ini difokuskan pada penilaian SKP, jadi teman-teman bisa melakukannya sendiri, dan selain rutilahu kita juga ada program Bersika, sama kaitannya dengan pengolahan limbah domestik," tuturnya. ● mdl

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA FIXED INCOME FUND ("SYAILENDRA FIXED INCOME FUND")

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA FIXED INCOME FUND yang telah diumumkan melalui surat kabar "International Media" tertanggal 12 Januari 2022, kami, PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari SYAILENDRA FIXED INCOME FUND, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA FIXED INCOME FUND sehubungan dengan ketentuan penerapan ketentuan Kelas Unit Penyerahan sebagaimana termaktub dalam akta addendum SYAILENDRA FIXED INCOME FUND.

Adapun rincian perubahan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyerahan SYAILENDRA FIXED INCOME FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 17 Maret 2022
Manajer Investasi
SYAILENDRA FIXED INCOME FUND
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Raja Pasar Abadi, tertanggal 07 Maret 2022 Nomor 03, dibuat di hadapan Merry Koesnadi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Cianjur, bahwa Perseroan telah dibubarkan dan dinyatakan dalam keadaan "likuidasi", terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 01, dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT RAJA PASAR ABADI (dalam likuidasi) tertanggal 10 Agustus 2021, nomor AHU-AH.01.10-0013982 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 November 2021 nomor 093, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut "Perseroan") beralamat di Mall Mangga Dua Square Blok A Lt.2/001, Jalan Gunung Sahari Raya A Nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Bahwa dengan ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan atau kreditor-kreditor agar segera mengajukan tagihan disertai dengan bukti-bukti yang cukup dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman ini kepada Tim Likuidator Perseroan, yang beralamat kantor di Gedung Wisma Pede 1st Floor Suite 111, Jalan Letjen M.T. Haryono No.Kav 17, Tebet Barat, Jakarta Selatan 12810.

Tim Likuidator
PT Raja Pasar Abadi
(Dalam Likuidasi)
RUDI HASOLOAN SIMANJUNTAK, S.H
DORMA HAULIAN SINAGA, S.H., M.H
LAMBOK GULTOM, S.H

PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT SEJAHTRA MANDIRI SANTOSA, Berkedudukan di Jakarta Pusat; sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Secara Sirkuler PT.SEJAHTRA MANDIRI SANTOSA, Tanggal 14-03-2022 No.2 yang dibuat di hadapan MELLIA, SH, Mkn, Notaris di Jakarta, telah diputuskan bahwa :

- Terhitung sejak tgl. 01-01-2019 perseroan telah dibubarkan
- Sebagai Likuidatur ditunjuk Para Pemegang Saham Perseroan untuk melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Likuidasi tersebut;
- Kepada para pihak yang berkepentingan agar dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini segera menyelesaikan dengan Likuidatur

Jakarta, 17-03-2022
LIKUIDATUR / PARA PEMEGANG SAHAM